BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 197 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan status penggunaan barang milik daerah oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

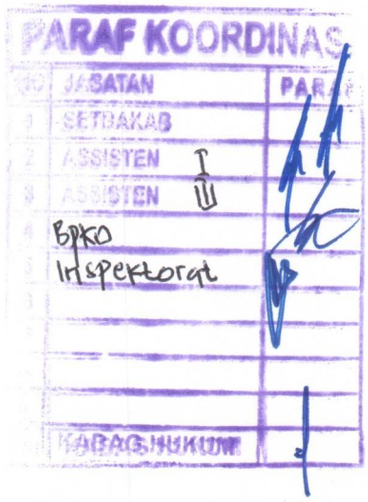
Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal barang milik daerah berada pada tanah dan/atau bangunan dalam penguasaan Pengguna Barang, maka barang milik daerah tersebut dicatat dalam Daftar Barang Milik Pengguna dimana tanah dan/atau bangunan tersebut, kecuali ditentukan sebagaimana diktum kesatu.

KETIGA : Mutasi barang milik daerah antar Perangkat Daerah setelah penetapan ini, dapat dilaksanakan dengan disertai berita acara serah terima antar Perangkat Daerah serta dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 maret 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/197/KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 17 Maret 2022

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Inspektorat
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 BPKD
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Bappeda
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 BPBD
9.	Badan Kesbang dan Politik	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Badan Kesbangpol
10.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Kesehatan
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas PU dan PERA
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Disdukcapil

OPD | KABAG HUKUM

14.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Diskoperindagsar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
17.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Satuan Polisi PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
18.	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Ketahanan Pangan
19.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
20.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Perkebunan dan Peternakan
21.	Dinas Perikanan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Perikanan
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas PMP
23.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Lingkungan Hidup
24.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
25.	Dinas Sosial	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Sosial
26.	Dinas Perhubungan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dishub
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Diskominfo
28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29.	RSUD Alimuddin Umar	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 RSUD Alimuddin Umar
30.	Kecamatan Balik Bukit	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Balik Bukit



31.	Kecamatan Belalau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Belalau
32.	Kecamatan Sumber Jaya	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Sumber Jaya
33.	Kecamatan Way Tenong	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Way Tenong
34.	Kecamatan Sekincau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Sekincau
35.	Kecamatan Suoh	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Suoh
36.	Kecamatan Batu Brak	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Batu Brak
37.	Kecamatan Sukau	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Sukau
38.	Kecamatan Gedung Surian	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Gedung Surian
39.	Kecamatan Kebun Tebu	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Kebun Tebu,
40.	Kecamatan Air Hitam	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Air Hitam
41.	Kecamatan Pagar Dewa	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Pagar Dewa
42.	Kecamatan Batu Ketulis	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Batu Ketulis
43.	Kecamatan Bandar Negeri Souh	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Bandarnegeri Souh
44.	Kecamatan Lumbok Seminung	Sesuai dengan LBMD (KIB A, B, C, D, E, dan F) Per 31 Desember 2021 Kec. Lumbok Seminung

PARAF KOORDINASI

1	SETDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN III
4	Bpkp
5	Inspektorat
6	
7	
8	
9	
10	KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS